



# INSPEKTORAT

LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

**TAHUN 2023**

## Matriks Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP) 2023

NO	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA		URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET(Rp)	REALISASI (Rp)	TAR GET	REALI SASI	Satuan	Kendala	Solusi
1	INSPEKTORAT	4.1	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	18.382.064.219,00	16.167.053.829,00					
2				Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.990.800,00	300.055.356,00					
3				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.152.000,00	120.096.931,00	3	3	Dokumen		

3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.732.800,00	17.563.098,00	4	4	Laporan	<p>1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tidak terealisasi sebesar Rp 57.169.702,00 karena kurangnya koordinasi internal dalam memperoleh laporan realisasi yang dibutuhkan tidak mudah didapatkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang kontrol sehingga terlewatkan anggaran yang belum direalisasikan.</p> <p>2. Pergantian PPTK yang juga kurang faham dalam pelaksanaan kegiatan</p>	Kontrol KPA dan PPTK dalam meningkatkan koordinasi serta pemilihan PPTK yang faham kegiatan
---	--	--	--	---	---------------	---------------	---	---	---------	---	---

4				Evaluasi Kinerja	192.906.000,00	162.395.327,00	4	4	Dokumen		
5				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.917.991.851,00</b>	<b>8.195.524.588,00</b>		0			
6				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.632.871.851,00	7.955.124.588,00	12	12	Bulan		
7				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.400.000,00	66.000.000,00	12	12	Laporan		
8				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	201.720.000,00	174.400.000,00	12	12	Laporan		
9				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.958.624.000,00</b>	<b>3.356.207.221,00</b>					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.580.000,00	94.072.000,00	3	3	Paket		

10			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.863.044.000,00	3.262.135.221,00	49	49	Orang		
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.231.206.600,00</b>	<b>2.638.187.436,00</b>					
11			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.719.000,00	8.874.036,00	5	5	Paket		
12			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1.997.402.800,00	1.855.493.000,00	5	5	Paket		

13				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.717.000,00	2.909.000,00	1	1	Paket	Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga tidak terealisasi sebesar Rp 2.808.000,00 karena kesalahan penganggaran yang seharusnya dianggarkan pada rekening belanja modal.	Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola kegiatan
14				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.368.000,00	154.589.000,00	36	36	Paket	Sub Kegiatan bahan logistik kantor tidak terealisasi sebesar Rp 82.779.000,00 karena anggaran diperoleh saat APBD Perubahan cukup besar sehingga realisasi tidak maksimal.	Kontrol KPA dan PPTK dalam menempatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan
15				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.999.800,00	738.580.000	2	2	Paket	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tidak terealisasi sebesar Rp 4.614.000,00 karena adanya penambahan mesin fotocopy dikantor.	
16				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	8	8	Dokumen		

17				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.000.000,00	604.936.600,00	12	12	Laporan	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak terealisasi sebesar Rp 360.063.400,00 karena anggaran diperoleh saat APBD Perubahan cukup besar sehingga realisasi tidak maksimal.	Kontrol KPA dan PPTK dalam menempatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan
18				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>726.340.000,00</b>	<b>661.611.606,00</b>					
19				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.000.000,00	425.400.000,00	1	1	Unit		
20				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.340.000,00	236.211.606,00	11	11	Unit		

21				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>551.199.968,00</b>	<b>466.631.407,00</b>					
22				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	5.176.160,00	12	12	Laporan		
23				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	201.856.000,00	164.312.034,00	12	12	Laporan		
24				Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.343.968,00	297.143.213,00	12	12	Laporan		
25				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>564.711.000,00</b>	<b>548.836.215,00</b>					

26				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.980.000,00	479.252.215,00	35	35	Unit		
27				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.600.000,00	37.510.000,00	5	5	Jenis		
28				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.150.000,00	12.150.000,00	1	1	Unit		
29				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.981.000,00	19.924.000,00	1	1	Unit		

30				<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASA N</b>	<b>3.812.926.000,00</b>	<b>2.709.855.850,00</b>					
31				<b>Penyelenggar aan Pengawasan Internal</b>	<b>2.303.163.000,00</b>	<b>1.624.653.111,00</b>					
32				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	251.097.000,00	149.598.560,00	4	4	Laporan	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah tidak terrealisasi sebesar Rp 101.498.440,00 dikarenakan kekurangan SDM yang membantu untuk pengawasan.	Mengusulkan Penambahan SDM sesuai kompetensinya
33				Reviu Laporan Kinerja	198.370.000,00	156.065.000,00	4	4	Laporan		
34				Reviu Laporan Keuangan	198.370.000,00	193.750.000,00	4	4	Laporan		

35			Pengawasan Desa	684.290.000,00	333.320.000,00	100	30	Kampung / Desa	Sub Kegiatan Pengawasan Desa tidak terealisasi sebesar Rp 350.970.000,00 karena banyaknya kegiatan Mandatory sehingga tidak dapat melakukan pengawasan pada Kampung/ Desa sesuai target.	Mengurangi Target atas kesepakatan bersama
36			Kerjasama Pengawasan Internal	387.948.000,00	343.477.599,00	2	2	Kesepakatan		
37			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	583.088.000,00	448.441.952,00	4	4	Laporan		

38				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.509.763.000,00	1.085.202.739,00					
39				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	200.233.000,00	148.459.270,00	4	4	Laporan		
40				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.309.530.000,00	936.743.469,00	25	25	Laporan		
41				<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>2.141.583.000,00</b>	<b>1.840.586.511,00</b>					
42				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							

43				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	235.862.000,00	102.103.314,00	1	1	Rekomendasi	Sub Kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan tidak terealisasi sebesar Rp 133.758.686,00 karena adanya perubahan regulasi terkait LHKASN dari SE Menpan RB nomor 01 tahun 2015 menjadi SE Menpan RB nomor 02 tahun 2023 dimana mekanisme pelaporan berubah dari LHKAN menjadi SPT. Sehingga anggaran perjalanan dinas, honor tim pelaksana kegiatan, honor narasumber dan lain-lain yang dianggarkan khusus untuk kegiatan LHKASN tidak dapat direalisasikan.
44				<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.905.721.000,00</b>	<b>1.738.483.197,00</b>				

45				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1.028.480.000,00	959.735.121,00	47	47	Perangkat Daerah		
46				Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	181.350.000,00	147.250.846,00	18	18	Perangkat Daerah		
47				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	402.527.000,00	375.375.030,00	12	12	Bulan		
48				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	293.364.000,00	256.122.200,00	47	47	Perangkat Daerah		
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>24.336.573.219,00</b>	<b>20.717.496.190,00</b>					

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	H.Rusdi,S.T	Sekretaris	
2	Rita Mayumi,S.E, M.E	Perencana Ahli Muda	

Tanjung Redeb, 19 Februari 2024

Inspektur



**Ir.H.Riza Fakhmi**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671001 199803 1 007